

Akselerasi Legalitas Usaha dan Penguatan Tata Kelola Administrasi UMKM: Pendampingan Partisipatif di Kabupaten Malaka

Marianus Manek ^{1*}, Dominikus Isak Petrus Berek ^{2*}, Agustinus Bere ^{3*},
Sabina Rambu Bangi ^{4*}.

¹Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua - Jl. Maroerai, Atambua Selatan (Lolowa), Kabupaten Belu - NTT

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua - Jl. Maroerai, Atambua Selatan (Lolowa), Kabupaten Belu - NTT

³Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Atambua - Jl. Maroerai, Atambua Selatan (Lolowa), Kabupaten Belu - NTT

⁴Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua - Jl. Maroerai, Atambua Selatan (Lolowa), Kabupaten Belu - NTT

E-mail: dominikisak55@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi di wilayah perbatasan melalui pendampingan langsung. Program ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Malaka dengan melibatkan mahasiswa praktikum sebagai agen penggerak. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pendampingan teknis, monitoring harga pasar dan asistensi administrasi perkantoran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dokumen perizinan, di mana pelaku usaha di desa-desa seperti Besikama dan Lakekun mendapatkan pendampingan pembuatan NIB dan NPWP secara langsung. Selain itu, tercipta sistem monitoring harga bahan pokok yang lebih teratur untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinergi antara akademisi dan instansi pemerintah daerah sangat krusial dalam mempercepat transformasi administrasi publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: Administrasi Publik, Legalitas UMKM, Kabupaten Malaka, Pendampingan Partisipatif, Wilayah Perbatasan.

ABSTRACT

This Community Service Program (PkM) aims to improve administrative capacity and business legality for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Cooperatives in border areas through direct assistance. The program was conducted at the Department of Industry, Trade, and Cooperatives of Malaka Regency, involving student interns as change agents. The method used was a participatory approach through technical assistance, market price monitoring, and office administration assistance. The results of the activity showed an increase in effectiveness in managing licensing documents, where business actors in villages such as Besikama and Lakekun received direct assistance in creating NIB and NPWP. In addition, a more organized basic commodity price monitoring system was created to maintain local economic stability. This activity concludes that synergy between academics and local government agencies is crucial in accelerating public administration transformation and community economic empowerment in border regions.

Keywords: Public Administration, MSME Legality, Malaka Regency, Participatory Assistance, Border Area.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Malaka, memerlukan penguatan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Sebagai daerah yang strategis, Malaka menghadapi tantangan dalam hal literasi administrasi dan rendahnya kepemilikan legalitas usaha di tingkat akar rumput. Rendahnya kapasitas SDM dalam mengelola administrasi perkantoran dan perizinan sering kali menjadi hambatan dalam mengakses program-program pemerintah.

STISIP Fajar Timur Atambua, melalui visi peningkatan mutu belajar, mengintegrasikan program

praktikum mahasiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan misi Kabupaten Malaka untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh melalui peningkatan kualitas SDM dan kompetensi masyarakat. Pendekatan ini merupakan implementasi dari teori pendidikan transformatif yang menekankan pentingnya keterlibatan intelektual dalam realitas sosial untuk melakukan perubahan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah: 1) Melakukan pendampingan teknis pembuatan legalitas usaha (NIB dan NPWP) bagi UMKM di pedesaan, 2) Menguatkan tata kelola administrasi internal instansi pemerintah daerah, dan 3) Menyediakan data monitoring harga barang pokok guna menjaga stabilitas pasar.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua bulan, terhitung sejak 29 Juli hingga 23 September 2025. Lokasi pengabdian berpusat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Malaka yang beralamat di Kompleks SDI Sukabi, Desa Kamanasa.

Sasaran utama program adalah aparatur dinas, pengurus koperasi, serta pelaku usaha di tingkat desa. Prosedur pelaksanaan meliputi:

1. **Observasi dan Identifikasi:** Melakukan pemetaan masalah administrasi dan kebutuhan perizinan di lapangan.
2. **Asistensi Administrasi:** Mahasiswa terlibat dalam pembuatan agenda surat, penginputan SPJ, dan pengarsipan dokumen guna meningkatkan efisiensi birokrasi.
3. **Pendampingan Lapangan:** Melakukan kunjungan ke desa-desa (seperti Besikama dan Lakekun) untuk verifikasi gedung koperasi dan fasilitasi pembuatan izin usaha secara digital.
4. **Monitoring Ekonomi:** Melakukan survei harga barang pokok di pasar tradisional dan toko secara berkala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola organisasi dan pelayanan publik di lingkungan mitra:

Akselerasi Legalitas dan Kelembagaan Usaha

Tim pengabdian melakukan pendampingan intensif bagi pelaku usaha dan pengurus Koperasi Merah Putih. Hasilnya, kendala teknis seperti NIK pengurus yang tidak terbaca pada sistem perizinan berhasil diidentifikasi dan dikonsultasikan dengan Dinas Perizinan. Pendampingan ini mencakup pemindaian akta koperasi dan pengisian formulir NPWP bagi anggota. Kunjungan lapangan ke Desa Besikama dan Lakekun memastikan bahwa sarana fisik koperasi telah sesuai dengan standar kelayakan operasional.

Penguatan Administrasi Perkantoran

Selama periode pengabdian, terjadi peningkatan ketertiban dalam pengelolaan surat menyurat. Mahasiswa membantu mengagendakan surat masuk dan keluar secara rutin. Selain itu, dilakukan asistensi dalam penyiapan dokumen penting seperti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dikawal langsung oleh Kepala Dinas. Hal ini terbukti meningkatkan kecepatan penandatanganan berkas di tingkat pimpinan daerah.

Stabilitas Ekonomi melalui Monitoring Harga

Monitoring harga dilakukan pada komoditas beras, pupuk, dan bahan bakar minyak (Pertalite). Data yang dikumpulkan di pasar dan toko diolah menjadi laporan harian bagi instansi. Upaya ini penting untuk mendeteksi fluktuasi harga yang dapat memberatkan masyarakat di wilayah perbatasan.

Analisis Kendala dan Strategi Pengembangan

Meskipun program berjalan baik, ditemukan kendala infrastruktur berupa keterbatasan mesin pencetak (printer) yang hanya tersedia satu unit di Subbagian Umum, sehingga menghambat ritme kerja. Strategi yang diterapkan adalah pembagian jadwal penggunaan alat secara ketat dan penguatan komunikasi antarpegawai agar target pekerjaan tetap tercapai.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa model pendampingan partisipatif efektif dalam menjembatani kesenjangan administrasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dokumen serta keberhasilan pendampingan legalitas bagi UMKM merupakan indikator keberhasilan program ini. Untuk keberlanjutan, disarankan agar pemerintah daerah menambah sarana prasarana pendukung pelayanan dan memperluas durasi program pendampingan serupa guna menjangkau lebih banyak pelaku usaha di wilayah pelosok Malaka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Malaka, Bapak Melkiaan Yosef Bere, S.IP, M.IP, beserta seluruh staf atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga disampaikan kepada STISIP Fajar Timur Atambua yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Mulyadi Setiawan, Ari. (2010). *Kendala atau Kesulitan*. Yogyakarta: Nuha Litera. Nafanu, Sirilius. (2022). *Panduan Kegiatan Praktikum Mahasiswa*. Kefamenanu: Tim.
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malaka.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). *Empowerment Theory, Research, and Application*. American Journal of Community Psychology.